



International Monetary Fund (IMF) Dan Penanggulangan Krisis Moneter Di Indonesia

Muhammad Lutfi¹, Hendra Ibrahim²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : muhammadlutfi0903@gmail.com

***Abstract** Research on international economics becomes interesting considering the existence of anomalies such as different economic systems and economic crises throughout the world, especially in Asia, during the last decade. This article discusses the nature of services offered by the International Monetary Fund (IMF), a global organization with an important role in the economy. An organizational profile is prepared along with some comments on the fundamental issues facing the group's workings. Important theoretical perspectives are incorporated throughout the narrative. The IMF has come up with a number of sources that provide all the information necessary to take more effective steps to help various economies come out of their current economic crises.*

Keywords: International Monetary Fund (IMF), Asia, Economic Crisis.

Abstrak Penelitian tentang ekonomi internasional menjadi menarik mengingat adanya anomali seperti sistem ekonomi yang berbeda dan krisis ekonomi di seluruh dunia, terutama di Asia, selama dekade terakhir. Artikel ini membahas sifat layanan yang ditawarkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), sebuah organisasi global dengan peran penting dalam perekonomian. Sebuah profil organisasi disusun bersama dengan beberapa komentar tentang isu-isu mendasar yang dihadapi oleh cara kerja kelompok tersebut. Perspektif teoretis penting digabungkan di seluruh narasi. IMF telah sampai pada sejumlah sumber yang memberikan semua informasi yang diperlukan untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk membantu berbagai ekonomi keluar dari krisis ekonomi mereka saat ini.

Kata Kunci: Dana Moneter Internasional (IMF), Asia, Krisis Ekonomi.

PENDAHULUAN

Penelitian tentang sejarah ekonomi internasional telah memperoleh minat baru sejak kita terus menghadapi tantangan yang sama dari bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri telah menjadi masalah yang kompleks karena mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Berikut kami hadirkan wacana ilmiah untuk mengakhiri krisis mata uang Indonesia. Sistem moneter internasional, juga dikenal sebagai "sistem mata uang cadangan" atau "rezim moneter internasional", mengacu pada definisi Stephen Krasner tentang "sistem mata uang cadangan" sebagai aturan, bea cukai, alat, infrastruktur, prosedur, dan lembaga yang terlibat dalam perdagangan internasional. transaksi moneter.¹

Sementara itu, sistem moneter adalah sistem yang mengatur jumlah uang beredar dan dapat diklasifikasikan menurut cara suku bunga ditentukan atau jenis cadangan devisa yang dimiliki. Ada beberapa jenis sistem perdagangan berdasarkan klasifikasi harga: sistem baku, sistem patokan, sistem pasak merangkak, dan sistem perdagangan terkendali dan bebas. Menurut skema klasifikasi aset internasional, komunitas ekonomi internasional telah

¹ Bogdanowitz-Bindert, Christine A. Solving Global Debt Crisis, (Ballinger Publishing Co, 1989)

mengembangkan standar emas, sistem penilaian mata uang kertas (seperti nilai dolar yang terlepas dari emas), dan nilai tukar emas (kombinasi antara keduanya).

Sistem moneter internasional terbaik memiliki aturan yang memaksimalkan arus perdagangan dan investasi internasional dan saling ketergantungan global sekaligus menciptakan sistem yang mendistribusikan keuntungan perdagangan secara adil di antara negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya.²

Kualitas sistem moneter internasional tertentu dapat dinilai berdasarkan tiga kriteria berbeda: Kriteria pertama untuk menyesuaikan suatu sistem adalah ketidaksetaraan yang melekat dalam cara menangani pembayaran, seperti kemudahan penggunaan, transparansi prosedurnya, dan transparansi kesalahan yang mungkin dibuat dalam memproses transaksi. Selain itu, sistem moneter internasional yang efektif harus memungkinkan pengurangan waktu dan uang yang dihabiskan untuk mencapai tingkat kesesuaian yang diperlukan.

KAJIAN TEORI

Pengertian IMF

International Monetary Fund (IMF) didirikan pada akhir tahun 1945 tetapi baru mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 1947, ketika 100 staf dikumpulkan dari 15 negara yang berbeda. Waktu yang dihabiskan Indonesia di IMF memiliki manfaat uniknya sendiri. Setelah bergabung dengan IMF pada tahun 1954 sebagai anggota nomor 56, Indonesia memiliki "periode keluar-ikutan" pada tahun 1965 dan 1967. Dalam hal penerimaan bantuan, Indonesia cukup berpengalaman, karena telah menerima bantuan dari International Monetary Fund (IMF). selama delapan tahun, dimulai dengan pengaturan siaga pada tahun 1968 dan berakhir pada tahun 1974. (Harinowo, 2004:7).

Meskipun baru-baru ini Indonesia menggunakan program yang dikembangkan bekerja sama dengan IMF, negara tersebut telah mampu memanfaatkan pengalamannya selama tiga tahun terakhir tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Secara praktis, pengalaman inilah yang pada akhirnya mendorong pemerintah Indonesia untuk menegosiasikan kembali perjanjian pinjamannya dengan Dana Moneter Internasional (IMF) (Harinowo, 2004:7).

International Monetary Fund (IMF) adalah salah satu organisasi paling berpengaruh yang berhasil memisahkan agenda pasar bebas dari pengaruh koruptif. Dengan meminjamkan miliaran dolar kepada elit dunia, IMF telah secara signifikan mengubah strategi ekonomi dan

² -----, *The Challenge of Global Capitalism*, (New Jersey: Princeton University Press, 2000)
Horsnell dan Mabro. *Oil Market and Prices*, (Itacha: 1993)

politik sebagian besar negara. Beberapa politisi telah memberlakukan alat kebijakan (disebut "penyesuaian struktural") dan model ekonomi dan politik yang menguntungkan minoritas dengan mengorbankan mayoritas (Danaher, 2005:12).

Terlepas dari efek negatif yang meluas dari kebijakan IMF, elit dunia terus menerapkannya dengan "setia". Mereka berlarian tanpa tujuan di tengah pusaran (treadmill) Hutang. Elit negara ketiga terkaya di dunia akan mendapat keuntungan finansial dari penerapan kebijakan antikorupsi yang lebih lunak. Namun, jika mereka lebih mementingkan kebutuhan rakyatnya sendiri daripada kebutuhan perusahaan transnasional, mereka akan menjadi agen perubahan yang lebih efektif.³

Jika negara-negara yang menambang logam mulia lebih memprioritaskan kepentingan warganya daripada kepentingan perusahaan multinasional, mereka akan terisolasi dari pasar keuangan global. Oleh karena itu, negara-negara pecinta hewan terus berupaya meningkatkan panen kayunya dengan menerapkan berbagai kebijakan ekspor ke pasar global, yang pada akhirnya hanya menguntungkan oligarki raksasa belaka yang korup⁴.

Kebijakan menarik investasi asing ini ditandai dengan penjualan murah sumber daya alam Indonesia kepada pengusaha asing sebagai kompensasi atas masuknya bantuan asing ke negara tersebut. Sementara itu, arus masuk valuta asing berkembang menjadi alat tekanan neokolonialis yang semakin menindas negara-negara donor Indonesia. Karena krisis mata uang saat ini, Indonesia juga harus mematuhi arahan IMF (Wismulyani dkk 2009:78-79). Hal ini mendorong peneliti untuk menggali lebih dalam topik bagaimana International Monetary Fund (IMF) mempengaruhi perumusan kebijakan ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru (1967-1974).

Penelitian tentang sejarah ekonomi internasional telah memperoleh minat baru sejak kita terus menghadapi tantangan yang sama dari bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri telah menjadi masalah yang kompleks karena mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Berikut kami hadirkan wacana ilmiah untuk mengakhiri krisis mata uang Indonesia. Sistem moneter internasional, juga dikenal sebagai "sistem mata uang cadangan" atau "rezim moneter internasional", mengacu pada definisi Stephen Krasner tentang "sistem mata uang cadangan" sebagai aturan, bea cukai, alat, infrastruktur, prosedur, dan lembaga yang terlibat dalam perdagangan internasional. transaksi moneter.⁵

³ Danaher, Kevin. (2005). 10 Alasan Bubarkan IMF dan Bank dunia. Jakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas. hlm 15

⁴ Danaher, Kevin. (2005). 10 Alasan Bubarkan IMF dan Bank dunia. Jakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas. hm 15

⁵ Bogdanowitz-Bindert, Christine A. Solving Global Debt Crisis, (Ballinger Publishing Co, 1989)

Sementara itu, sistem moneter adalah sistem yang mengatur jumlah uang beredar dan dapat diklasifikasikan menurut cara suku bunga ditentukan atau jenis cadangan devisa yang dimiliki. Ada beberapa jenis sistem perdagangan berdasarkan klasifikasi harga: sistem baku, sistem patokan, sistem pasak merangkak, dan sistem perdagangan terkendali dan bebas. Menurut skema klasifikasi aset internasional, komunitas ekonomi internasional telah mengembangkan standar emas, sistem penilaian mata uang kertas (seperti nilai dolar yang terlepas dari emas), dan nilai tukar emas (kombinasi antara keduanya).

Sistem moneter internasional terbaik memiliki aturan yang memaksimalkan arus perdagangan dan investasi internasional dan saling ketergantungan global sekaligus menciptakan sistem yang mendistribusikan keuntungan perdagangan secara adil di antara negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya.⁶

Kualitas sistem moneter internasional tertentu dapat dinilai berdasarkan tiga kriteria berbeda: Kriteria pertama untuk menyesuaikan suatu sistem adalah ketidaksetaraan yang melekat dalam cara menangani pembayaran, seperti kemudahan penggunaan, transparansi prosedurnya, dan transparansi kesalahan yang mungkin dibuat dalam memproses transaksi. Selain itu, sistem moneter internasional yang efektif harus memungkinkan pengurangan waktu dan uang yang dihabiskan untuk mencapai tingkat kesesuaian yang diperlukan.

Pengertian Organisasi Internasional

Organisasi internasional, yang memainkan banyak peran dalam hubungan internasional, merupakan fokus utama penelitian hubungan internasional. Organisasi internasional pada awalnya didirikan dengan tujuan untuk menjaga aturan dan regulasi untuk menjamin kelancaran kerjasama menuju tujuan bersama dan sebagai sarana membina hubungan antar bangsa untuk memastikan bahwa kepentingan masing-masing negara terlindungi dalam konteks interaksi global. Organisasi internasional didefinisikan sebagai struktur formal dan komprehensif yang dibentuk melalui kesepakatan antara anggota (baik pemerintah maupun non-pemerintah) dari dua negara atau lebih untuk tujuan memajukan kepentingan bersama. Selanjutnya, upaya untuk mendefinisikan sebuah organisasi internasional harus mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut, lembaga yang saat ini dapat diakses olehnya, dan proses pemerintah untuk memperkirakan dampak peraturan terhadap hubungan antara negara yang bersangkutan dan aktor lain di luar negara tersebut. dia.

⁶ -----, *The Challenge of Global Capitalism*, (New Jersey: Princeton University Press, 2000)
Horsnell dan Mabro. *Oil Market and Prices*, (Itacha: 1993)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yang berarti bahwa masalah-masalah yang ada di bidang hubungan internasional harus diperhitungkan ketika merancang studi di bidang ini, sebelum dibandingkan dengan kerangka teori yang dikembangkan untuk subjek ini. Penulis juga menggunakan teknik penelitian kualitatif yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Teknik ini melibatkan melakukan penelitian dengan data kualitatif, yang mungkin berbentuk angka, kata, diagram, atau gambar. Penelitian ini menggunakan berbagai tipe data, baik statistik maupun tekstual, untuk mendukung argumennya. Studi ini akan menggunakan data sekunder, artinya informasi tersebut telah dikumpulkan, dikategorikan, dan disediakan untuk umum oleh sumber yang berwenang. Informasi dikumpulkan melalui sumber sekunder bukan sumber primer, seperti buku, dokumen, atau karya peneliti sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sejarah IMF

Pada bulan Juli tahun 1944, perwakilan dari Amerika Serikat, Inggris Raya, dan 44 negara lainnya bertemu di sebuah kota kecil bernama Bretton Woods di negara bagian New Hampshire, Amerika, untuk membahas reformasi moneter internasional dan bertukar pikiran tentang jenis sistem moneter yang akan diperlukan setelah perang berakhir. Pertemuan ini selanjutnya dibayangi oleh perasaan negatif tentang keadaan ekonomi global yang mengerikan sebelum perang pecah. Tujuannya adalah untuk membangun sistem moneter global yang dapat menjamin lapangan kerja penuh dan stabilitas harga sementara juga memungkinkan semua negara mencapai keseimbangan eksternal tanpa memaksakan hambatan perdagangan.

Keputusan penting dibuat selama pertemuan ini, termasuk pembentukan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD), lebih dikenal sebagai Bank Dunia (Bank Dunia). Dana Moneter Internasional memperhatikan kinerja ekonomi makro dan kebijakan sektor keuangan sedangkan Bank Dunia memprioritaskan pembangunan jangka panjang dan pengurangan emisi.

Dana Moneter Internasional didirikan dengan dua fungsi utama: pertama, memantau kepatuhan negara-negara anggota terhadap seperangkat aturan yang disepakati untuk menangani perdagangan dan keuangan internasional. Kedua, membuat dana kredit atau pinjaman tersedia bagi negara-negara yang mengalami kesulitan sementara membayar utangnya. Dengan kata lain, IMF didirikan untuk memantau dan memelihara sistem moneter internasional yang dibentuk setelah Perang Dunia II dan untuk memberikan kredit kepada

negara-negara yang mengalami kesulitan jangka pendek dengan cadangan devisanya dan kesulitan jangka panjang dengan kemampuan pemerintahnya untuk membayar tagihannya. .

Dana Moneter Internasional membuka pintu keanggotaannya pada tanggal 1 Maret 1947.

Tiga puluh negara, termasuk yang memisahkan diri dari Uni Soviet dan lainnya yang bergabung dengan Blok Komunis pada awal 1990-an, secara resmi terdaftar sebagai anggota penuh. Ketika tahun 1994 dimulai, 178 negara menjadi anggota Dana Moneter Internasional.

Salah satu landasan manajemen moneter IMF adalah persyaratan bahwa semua negara anggota mendevaluasi mata uang mereka relatif terhadap dolar AS, sedangkan nilai dolar AS harus didevaluasi relatif terhadap emas. Dengan demikian, kekuatan sistem ini terletak pada kemampuannya menerapkan disiplin moneter di semua negara.

Sudut pandang ini didasarkan pada asumsi bahwa sistem nilai tukar yang berfluktuasi tidak lebih dari kedok untuk mempromosikan praktik spekulasi yang merusak stabilitas moneter dan menghalangi hubungan perdagangan internasional. Selain manfaat dari fasilitas kredit dan pinjaman IMF, ketentuan lain dari perjanjian keanggotaan terkait terus menjadi sumber dorongan. Dana Moneter Internasional selalu siap untuk meminjamkan mata uang asing kepada negara-negara anggota yang mengalami kesulitan keuangan, seperti defisit perdagangan yang melebar yang tidak dapat diatasi dengan kebijakan fiskal atau moneter. Ini adalah kemungkinan nyata ketika mempertimbangkan dampak negatif kebijakan ini terhadap pasar kerja domestik. Pada saat yang sama, uang pinjaman IMF berasal dari kontribusi wajib semua anggota, yang berdenominasi emas dan bentuk mata uang asing lainnya.

Keduanya adalah contoh saling pengertian. Sementara nilai tukar semua negara tetap rendah, dalam keadaan tertentu, mata uang ini dapat direvaluasi atau didevaluasi relatif terhadap dolar AS jika Dana Moneter Internasional (IMF) menetapkan bahwa sistem pembayaran negara-negara yang terlibat telah mengalami "kesejahteraan fundamental". Meskipun secara spesifik klausul ini tidak dijabarkan dalam perjanjian IMF, jelas bahwa klausul ini ditujukan untuk negara-negara di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan ketika menyangkut perdagangan internasional. Komitmen IMF mendorong para anggotanya untuk membuat mata uang mereka dapat dikonversi. Situasi ini sangat penting untuk mendorong perdagangan multilateral yang produktif. Kebijakan IMF hanya mengizinkan terjadinya konvertibilitas untuk transaksi neraca.

Selain itu, semua negara diizinkan untuk memberlakukan pembatasan transaksi moneter di dalam perbatasan mereka selama mata uang nasional mereka dapat digunakan dalam semua transaksi masuk dan keluar dalam neraca. Fungsi utama Dana Moneter

Internasional adalah sebagai acuan bagi investor ketika menilai daya tarik suatu negara sebagai tujuan investasi. Penilaian IMF atas kelayakan kredit suatu negara berfungsi sebagai tolok ukur terhadap lembaga keuangan internasional lainnya, seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, mengukur pinjaman mereka sendiri ke suatu negara. Pemerintah anggota IMF juga berperan sebagai kreditur dalam menentukan apakah suatu negara memiliki hak untuk mengakses sumber daya IMF atau tidak. Jika suatu negara tidak memiliki peringkat kredit yang tinggi, akan sulit mendapatkan bantuan keuangan dari organisasi multilateral atau pemberi pinjaman bilateral. Situasi ini bisa dipahami dengan melihat sejarah Indonesia di bawah pengawasan IMF. Evaluasi IMF terhadap pelaksanaan program penyesuaian yang tertuang dalam LoI RI-IMF cukup ketat. Jika pemerintah gagal menjalankan komitmen yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, Dana Moneter Internasional (IMF) akan menangguk program pinjamannya, yang sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan ekonomi. Lebih jauh lagi, wanprestasi ini dimaknai sebagai pertanda buruk bagi negara kreditur. Sayangnya, hal ini semakin mempersulit Indonesia untuk mendapatkan kepercayaan internasional dan diakui sebagai tujuan investasi yang dapat diandalkan.

Misi/Tujuan Pendirian IMF

Mengingat pelajaran dari Depresi Besar 1929–1939, jelas bahwa krisis pembayaran dan penurunan nilai mata uang domestik relatif terhadap mata uang asing dapat memaksa beberapa negara untuk menerapkan kebijakan proteksionis yang membatasi partisipasi mereka dalam perdagangan internasional. dalam rangka menjaga kepentingan nasional. Mengingat peran IMF sebagai mata uang cadangan dunia, para anggotanya telah memberikan wewenang kepada organisasi tersebut untuk memelopori upaya penyelamatan untuk mencegah penyebaran kebijakan proteksionis dalam perdagangan internasional (rencana penyelamatan). Tujuan yang dinyatakannya adalah untuk memulihkan situasi secepat mungkin untuk membangun stabilitas moneter global, sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang yang mengatur IMF.

Sistem Bretton Woods adalah standar emas internasional untuk kebijakan moneter dan akan tetap berlaku di masa mendatang. Dana moneter internasional ini memiliki dua tujuan utama: (i) memverifikasi kepatuhan negara-negara anggota terhadap kerangka kerja yang disepakati untuk mengelola perdagangan dan keuangan internasional; dan (ii) melemahkan kerangka tersebut. Kedua, memberikan kredit atau pinjaman kepada negara-negara yang untuk sementara kesulitan membayar pajaknya.

Program pinjaman IMF memiliki batasan yang ketat dan hanya dapat digunakan untuk menutup sementara defisit anggaran dalam sistem pembayaran. Pinjaman ini harus dilunasi

dalam waktu tiga sampai lima tahun agar tidak mengganggu kemampuan IMF untuk menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk kebutuhan lainnya. Pinjaman untuk pembangunan jangka panjang dapat diperoleh melalui Bank Dunia, yang secara resmi dikenal sebagai Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD), atau dari organisasi lain yang berafiliasi dengan Bank Dunia, seperti International Development Association (IDA). Bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi investasi sektor swasta dalam pembangunan nasional melalui sumber pendanaan domestik dan internasional, International Finance Corporation (IFC) didirikan pada tahun 1956.

IMF juga berwenang untuk mengumpulkan dan menyusun informasi yang berkaitan dengan praktik pembayaran negara-negara anggota, termasuk memantau arus perdagangan internasional dan mengumpulkan data ekonomi utama dari berbagai sumber, seperti Statistik Keuangan Internasional dan Statistik Arah Perdagangan. Terbitan tersebut adalah bahan referensi terlengkap yang tersedia untuk menganalisis data perdagangan dan indikator ekonomi utama lainnya untuk negara-negara anggota IMF.

Ketika suatu negara bergabung dengan IMF secara resmi, ia harus membayar organisasi tersebut 25 persen dari iuran keanggotaannya dalam bentuk emas dan 75 persen sisanya dalam mata uangnya sendiri. Pinjaman IMF diperlukan pada saat kritis ini untuk negara itu. Uang Dana Moneter Internasional (IMF) didistribusikan dalam mata uang yang dapat dikonversi secara bebas yang nilai tukarnya ditetapkan oleh IMF. Jika kekurangan anggaran suatu negara melebihi kuotanya di Dana Moneter Internasional (IMF), IMF akan meminjamkan negara tersebut hingga 200 persen dari jumlah kuota negara tersebut dengan IMF dalam mata uangnya sendiri.

Menurut peraturan IMF, setiap negara anggota diperbolehkan untuk meminjam hingga maksimal 20% dari nilai kuotanya per tahun dan hingga total 125% selama maksimal 5 tahun. Negara ini juga dapat menarik 25% pertama dari anggarannya, sehingga mendapat julukan "ambang emas" tanpa masalah. Tidak ada kriteria khusus yang diperlukan dari negara itu atau negara lain mana pun dalam perahu yang sama. Mentransfer uang adalah proses yang sederhana. Namun, IMF akan mematuhi prosedur yang lebih ketat dan menggunakan target suku bunga yang lebih tinggi untuk mendapatkan pinjaman tambahan di tahun-tahun mendatang (juga dikenal sebagai "house of credit"). Ini karena tingkat pengembalian yang lebih tinggi diharapkan dari jumlah uang yang lebih besar.

Jadwal pembayaran utang suatu negara kepada Dana Moneter Internasional biasanya harus diselesaikan dalam waktu tiga sampai lima tahun, menggunakan mata uang negara itu sendiri. Kurs valuta asing yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional adalah alat

pembayaran yang dapat digunakan untuk melengkapi mata uang nasional yang terdevaluasi. Pembayaran ini harus dilakukan hingga 75% kuota negara disimpan dalam mata uang domestik oleh IMF dan 25% disimpan dalam emas atau mata uang konversi lainnya. Dana Moneter Internasional juga mengizinkan pembayaran dilakukan dalam mata uang asing, selama jumlah total yang dibayarkan tidak melebihi 75% dari total cadangan yang dikelola oleh IMF.

Jika penilaian IMF terhadap mata uang suatu negara lebih dari 75 persen dari nilai mata uang tersebut, negara tersebut dapat meminjam uang tanpa harus membayar pinjaman dalam mata uangnya sendiri. Serangkaian fasilitas ini sering disebut sebagai "tempat induk". Namun, jika IMF kekurangan jenis mata uang tertentu dan negara yang memilikinya tidak muncul untuk membayar kembali pinjamannya, IMF dapat menyatakan mata uang tersebut sebagai "langka" dan menginstruksikan negara anggota untuk melakukan diskriminasi dalam perdagangan mereka. praktik terhadap negara yang memiliki mata uang yang bersangkutan. Situasi ini didasarkan pada kebijakan IMF yang memandang proses penyelesaian kesenjangan pembayaran sebagai tanggung jawab bersama yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang mengalami defisit maupun surplus. Hingga saat ini, IMF belum secara resmi menetapkan mata uang apa pun sebagai "hak penarikan khusus", yang berarti bahwa masing-masing negara masih tunduk pada bentuk diskriminasi yang sama dalam perdagangan internasional yang dilarang oleh undang-undang.

Jangka Pendek Kebijakan IMF

Penekanan awal dari strategi pertumbuhan IMF yang sering dikenal dengan Pendekatan Ortodoks adalah pada optimalisasi sektor swasta untuk memperkuat mekanisme pasar. Meskipun demikian, telah mendapat kritik dari luar lingkup ekonomi IMF karena penekanan yang berlebihan pada implementasi pasar. Belakangan, IMF mulai memperhatikan faktor-faktor di luar mekanisme pasar, seperti upaya menurunkan inflasi dengan memperlambat permintaan, mengendalikan harga, mereformasi institusi politik atau mempercepat langkah menuju demokrasi, memangkas subsidi pemerintah atau bahkan menghilangkannya sama sekali. dan mengurangi kenaikan gaji pegawai pemerintah agar tidak menekan pertumbuhan ekonomi. Metode ini disebut sebagai "Pendekatan Heterodox."

Menurut teorema stabilitas hegemonik, sistem moneter internasional yang efektif hanya dapat dibuat jika semua negara peserta mengadopsi kebijakan ekonomi pasar bebas. Suatu negara hanya akan diakui sebagai anggota sistem jasa IMF jika pemerintahnya secara konsisten menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi. Pada awal krisis moneter Indonesia, IMF mendorong pemerintah Indonesia untuk beralih dari ekonomi komando ke ekonomi pasar. Ini merupakan langkah awal dalam membantu penyelesaian krisis moneter di Indonesia. Meskipun

Indonesia telah menandatangani GATT dan menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia, IMF mengklaim Indonesia belum konsisten menerapkan prinsip ekonomi pasar dalam pengambilan kebijakan di dalam negeri. Hal ini terlihat dari maraknya kebijakan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip ekonomi pasar. Dengan demikian, kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Eksekutif IMF Michel Camdessus merupakan transisi menuju sistem ekonomi berbasis pasar seperti yang disyaratkan oleh IMF. Salah satu aspek terpenting dari kebijakan BBM saat ini adalah bahwa kebijakan tersebut dengan jelas mengamankan keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga jual domestik di bawah tingkat pasar. negara antara tahun 1990 dan 1993. Perekonomian telah melihat perubahan penting. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa PDB riil tumbuh rata-rata 3,1 persen per tahun antara tahun 1988 dan 1994, dan inflasi turun dari hampir 145 persen menjadi delapan persen selama periode yang sama.

Pada kenyataannya, sebagian besar modal asing yang mengalir ke Meksiko terdiri dari investasi portofolio atau deposito jangka pendek. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak akan berlanjut dengan kecepatan yang stabil untuk waktu yang lama. Kemudian pada tahun 1994, Meksiko mengalami krisis lain, kali ini yang bahkan lebih parah daripada yang dialaminya pada tahun 1980-an. Defisit neraca perdagangan Meksiko mencapai hampir \$30 juta dolar AS, atau sekitar sepuluh persen dari PDB negara itu. Situasi di Argentina tahun 2001 juga sama. Ketika krisis melanda Argentina, IMF menggunakan pendekatan yang sama seperti Meksiko dan menerapkan kebijakan liberalisasi. Implikasinya, sejumlah besar modal asing akan masuk ke Argentina. Pemerintah Argentina mengumpulkan lebih dari \$49.000.000 orang Amerika antara tahun 1991 dan 1999, menurut data dari Bank Dunia. Sejumlah besar modal asing mengalir masuk, dalam bentuk FDI, pinjaman, obligasi, dan investasi portofolio. Telah dihitung bahwa Argentina memiliki surplus sekitar 53.000.000 USD dalam transfer bersih sumber dayanya antara tahun 1991 dan 1999.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemilik usaha swasta yang tertarik untuk membeli peternakan di sektor nirlaba. Strategi ini hanya akan memperluas yang sudah ada menjual bisnis ke titik di mana hal itu mengancam ketidakstabilan mekanisme pasar yang baru saja mulai dia terima. Sementara di sisi lain, ketimpangan ekonomi yang dihasilkan antara berbagai bagian masyarakat telah menyebabkan munculnya masalah kebijakan sosial.

Kebijakan Jangka Pendek

Dana Moneter Internasional Kebijakan IMF jangka panjang bertujuan untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang dilanda krisis dengan menegakkan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan liberalisasi yang dianut oleh Konsensus Washington. Konsensus Washington adalah seperangkat keyakinan neoliberal yang prinsip utamanya adalah

keyakinan bahwa pasar harus dibiarkan berfungsi secara bebas. Jika dipraktikkan, neoliberalisme merupakan penyimpangan dari teori ekonomi kapitalis yang berpandangan bahwa kepemilikan modal menentukan sistem ekonomi.⁷

Konsep hak kepemilikan pribadi dan pengejaran keuntungan adalah inti dari ekonomi pasar bebas, terkadang dikenal sebagai sistem kapitalis atau sistem bisnis berbasis pasar. Kapitalisme secara luas masih dianggap sebagai model ekonomi terbaik untuk mendorong kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk pajak yang rendah, perdagangan bebas, dan pasar modal yang terbuka. Karena alasan ini, tidak ada alternatif yang layak untuk sistem ekonomi kapitalis yang memenuhi kriteria yang diperlukan untuk dijadikan cetak biru perdagangan internasional dan kebijakan moneter. Menurut buku 1776 ekonom Skotlandia Adam Smith, "The Nature and Causes of the Wealth of Nations," ekonomi pasar menawarkan banyak kebebasan bagi ekonomi untuk mengejar tujuan yang baik, didukung oleh sistem produksi yang efisien yang menghasilkan lebih banyak barang dan jasa. . Mekanisme pasar beroperasi secara otonom dan terkadang didorong oleh "tangan hantu". Peran negara dalam konteks ini dianggap kecil.

RAF melakukan perubahan kebijakan sebagai jawaban atas upaya Indonesia untuk menggenjot perekonomiannya setelah menyadari kesalahan masa lalu negara tersebut dan menyadari bahwa perubahan ekonomi tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan ranah politik. Perubahan ini mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi negara mana pun yang ingin melakukan perubahan mendasar pada ekonominya.

Kebijakan yang dimaksud di sini termasuk stabilitas ekonomi makro jangka panjang dan promosi standar perdagangan bebas. Menerapkan privatisasi atas dasar teritorial dan memposisikan kembali negara sebagai kekuatan pendorong di belakang reformasi kelembagaan yang bertujuan untuk memperkuat sektor swasta adalah dua komponen kunci dari strategi ini. Itu termasuk mendorong pertumbuhan di sektor keuangan, menyiapkan undang-undang untuk menjadi prinsip panduan dalam pelaksanaan perdagangan bebas, dan menerapkan jaring pengaman sosial.

Selain itu, good governance dapat diwujudkan dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kronisme, dan nepotisme, serta dengan menjaga stabilitas politik dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat setempat. Definisi governance menurut IMF lebih terfokus pada dukungan terhadap mekanisme pasar.

⁷ Feldstein, Martin, "Refocusing the IMF," dalam *Foreign Affairs*, (Maret/April 1998) Fisher, Stanley, "In defense of the IMF, special tools for a special task," dalam *Foreign Affairs*, Volume 77, No. 4, (Juli/Agustus)

Ada persaingan bebas di antara para pelaku ekonomi, dan mekanisme alokasi sumber daya dan penetapan harga di sektor swasta mendapat lebih banyak perhatian. Tujuannya adalah untuk membuat negara lebih bertanggung jawab atas masalah sosial.

Mencermati kebijakan-kebijakan yang diterapkan IMF selama ini dalam rangka mengatur sistem moneter internasional, jelas bahwa peran IMF tidak lagi signifikan. Dengan kata lain, kebijakan yang direkomendasikan IMF untuk mengatasi krisis mata uang suatu negara tidak lagi efektif. Seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini, negara-negara penerima bantuan IMF belum mengalami ekspansi ekonomi yang sangat pesat. Indonesia adalah yang paling miskin dari empat negara Asia yang didukung oleh Dana Moneter Internasional. Bahkan Thailand tidak lagi membutuhkan bantuan IMF.

Sementara itu, Korea Selatan mendapat keuntungan dari masuknya modal investasi asing. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satu dari lima negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, hanya tumbuh 0,7 persen pada triwulan ketiga tahun 1999. Ekspansi ekonomi tercepat terjadi di Korea Selatan, yaitu sebesar 12,3% setiap tahun. Kedua, 7,7 persen adalah Thailand. Krisis keuangan Asia, sebagian karena kurangnya upaya untuk mengendalikan akses spekulatif pasar keuangan dunia, memberikan konteks yang berguna untuk memahami fenomena ini. IMF tidak memiliki informasi yang dapat diandalkan tentang arus masuk dan keluar modal di negara-negara Asia. Namun, ketidakmampuan negara-negara tersebut untuk mengendalikan pinjaman besar mereka yang luar biasa juga menjadi faktor penyebab krisis.⁸

KESIMPULAN

Namun, sebagai organisasi internasional dengan fungsi watchdog, IMF seharusnya memiliki mekanisme pencegahan krisis lebih dari sekadar sistem peringatan dini berupa peringatan harian tentang kemungkinan terjadinya krisis moneter. Meskipun demikian, sebagai otoritas moneter internasional, IMF harus dapat memprediksi dan mengingatkan negara-negara yang memiliki cadangan ekonomi yang tidak memadai akibat upaya pembangunan yang berbasis pada suaka pajak untuk meningkatkan upaya mereka guna memastikan bahwa pendapatan pajak mereka tidak disalahgunakan. Namun, IMF harus mampu mengantisipasi tanda-tanda peringatan ekonomi global yang goyah, khususnya di Asia, agar krisis dapat ditangani dengan cepat dan efektif.

⁸ K.S, Jomo (ed). *Tigers in Trouble Financial Governance, Liberalization and Crises in East Asia*, (Hongkong University Press, 1998)

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdanowitz-Bindert, Christine A. Solving Global Debt Crisis, (Ballinger Publishing Co, 1989)
- Gilpin, Robert. The Political Economy of International Relations, (New Jersey: Princeton University Press, 1987)
- , The Challenge of Global Capitalism, (New Jersey: Princeton University Press, 2000)
- Horsnell dan Mabro. Oil Market and Prices, (Itacha: 1993)
- K.S, Jomo (ed). Tigers in Trouble Financial Governance, Liberalization and Crises in East Asia, (Hongkong University Press, 1998)
- Krasner, Stephen. International Regimes, (Itacha: Cornell University Press 1983) Neuman, W. Lawrence. Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches, (Allyn and Bacon)
- Bello, Walden, "What is IMF'S Agenda for Asia," dalam Focus on the Global South (27 Januari 1998)
- Feldstein, Martin, "Refocusing the IMF," dalam Foreign Affairs, (Maret/April 1998) Fisher, Stanley, "In defense of the IMF, special tools for a special task," dalam Foreign Affairs, Volume 77, No. 4, (Juli/Agustus)
- Danaher, Kevin. (2005). 10 Alasan Bubarkan IMF dan Bank dunia. Jakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Kaelan, M.S. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner dalam bidang sosial, agama, Budaya, Filsafat dan Humaniora. Yogyakarta: Paradigma.